

Akuntabilitas Pengelolaan Persepuluhan Jemaat

Agustina Christina Patty¹, Azmida L. Kwalomine², Stevanus Johan Gomies³

^{1,3} Politeknik Negeri Ambon, Maluku, Indonesia

² STIEM Rutu Nusa Ambon, Maluku, Indonesia

agustinachristinapatty@gmail.com

Abstract: *This study was aimed to understand the meaning of by-tens accountability in GPM BETHEL Church. By tents accountability is a phenomenon that should be examined by the church. Paradigm used in this study was interpretive paradigm with Husserl transcendental phenomenology". Based on meaningful accountability practice, thus BETHEL Church Congregation of Allang had three accountability dimension that are: social dimension which put by tenth accountability being understand as self-responsibility toward church and social responsibility toward people in need. and finance dimension which is a supporting dimension between spiritual and social dimension. BETHEL Church Congregation of Allang actually had long-practice accountability.*

Keywords: *By Tenth Accountability, Husserl Transcendental Phenomenology*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari makna akuntabilitas *perpuluhan* pada Jemaat GPM BETHEL Allang. Penelitian ini menggunakan fenomenologi transcendental Husser. Hasil analisis menemukan adanya 2 dimensi pemaknaan akuntabilitas sosila oleh jemaat GPM BETHEL antara lain; akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggung jawab diri terhadap gereja, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hal ini tampak nyata lewat bentuk pemaknaan dan pengelolaan perpuluhan pada Jemaat GPM BETHEL Allang dan dipenuhi dengan berbagai persepsi yang melekat pada pemikiran anggota jemaat.

Kata Kunci: Akuntabilitas Perpuluhan Jemaat, Fenomenologi Transendental Husserl

Pendahuluan

Penelitian akuntansi dan akuntabilitas dalam NGO Gereja telah banyak dilakukan oleh Laughlin, (1988); Laughlin, (1990); Booth, (1993); Duncan, Flesher, & Stocks, (1999); Lightbody, (2001); Jacobs, K and Walker, (2000); Ducan & Fisher (2002); Anthony J. Berry, (2005); Lobo, Annie, (2007); Novie. A, (2024) dan Wahyu (2004). Secara khusus Jacobs, K and Walker, (2000) meneliti bentuk praktik akuntabilitas di lingkungan gereja komunitas IONA (organisasi Kristen ekumenis global yang berkomitmen untuk mempromosikan keadilan, perdamaian, pemulihan komunitas dan penyegaran dalam ibadah). Kajian pendukung khususnya yang terkait dengan komunitas bersumber dari hasil penelitian Saerang, (2003) di Indonesia tentang komunitas Gereja Pentakosta di Indonesia dan hasil penelitian Jacobs, K and Walker, (2000) yang menemukan adanya kegiatan keseharian komunitas IONA yang ditentukan oleh aturan Kristiani. Kegiatan keseharian organisasi gereja seperti penerimaan dan penggunaan dana sumbangan dan operasional dicatat

dan setiap anggota pun berhak meminta penjelasan atas akun-akun tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi dan akuntabilitas dibangun dalam bentuk transparansi. Transparansi catatan akuntansi sebagai domain akuntabilitas, mencerminkan refleksi spiritual dan agama pada praktik akuntansi yang berfungsi untuk membangun akuntabilitas, baik secara individu maupun organisasi terhadap Tuhan.

Gereja Protestan Maluku (GPM) sampai saat ini masih berpedoman pada Pola Induk Pelayanan (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) GPM yang merupakan pedoman arah dan kebijakan bergereja GPM dalam kurun waktu tertentu. Implementasi PIP RIPP GPM adalah program dan kebijakan yang tentunya berkonsekuensi dengan anggaran. Khusus untuk pengelolaan keuangan gereja, GPM menganut sistem anggaran berimbang antara pendapatan dan pengeluaran secara transparan dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah terkait hal penggunaan dan pengelolaan keuangan gereja.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa dalam kenyataannya akuntabilitas keuangan di GPM dapat dikatakan sangat baik. Terbukti dengan dilakukannya sistem verifikasi laporan keuangan dan penyampaian laporan posisi kas keuangan gereja sampai di tingkat Jemaat yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Namun seperti yang telah disinggung di atas bahwa masih saja ditemui adanya masalah keuangan yang salah satunya bersumber dari persepuluhan warga jemaat GPM.

Perpuluhan juga memiliki makna lain selain dari makna milik Tuhan di dalamnya, makna lain itu adalah adanya sebuah tanggungjawab sosial di dalamnya. Berbicara mengenai perpuluhan, tentunya lagi-lagi tidak akan pernah lepas dari peran sebuah penatalayanan. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa penatalayanan bisa juga dikatakan sebagai sebuah manajemen layaknya pada suatu organisasi. Penatalayanan yang *me-manage* harta benda atau kekayaan yang sudah dipercayakan dengan sepenuhnya oleh Tuhan kepadanya dan kemudian "mengembalikannya" lagi kepada Tuhan dalam bentuk perpuluhan, sehingga bisa dikatakan bahwa penatalayanan dan perpuluhan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau dijauhkan dari masing-masing sisi.

Dalam pengungkapan informasi keuangan NGO termasuk gereja diperlukan akuntabilitas (McGann & Johnstone, 2005) yang diharapkan dapat membantu para pejabat struktural gereja dalam mengelola keuangan, sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan gereja. Dikatakan demikian karena sampai saat ini yang dijumpai sampai saat ini (di tingkat Jemaat) bahwa masih terdapat kecenderungan untuk lebih memfokuskan pada bentuk bangunan fisik, sementara pelayanan dan pengelolaan keuangan gereja relatif kurang mendapat perhatian khusus dari pejabat struktural gereja. Menyikapi hal-hal tersebut maka gereja harus membenahi diri untuk melihat hal-

hal tersebut bukan saja secara fisik, tetapi lebih berfokus pada pemberdayaan manusia serta pengelolaan keuangan sebagai bagian yang sangat penting bagi pembangunan gereja itu sendiri.

Dalam pandangan iman Kristen ada sebuah berita baik bahwa Tuhan berjanji akan memberikan berkat untuk umatNya yang taat jika melakukan kebenaran, seperti dalam Maleakhi 3 : 10 yang berbunyi;

”Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu kedalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahKu dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.”

Maksud dari ayat ini adalah ada sebuah konsekuensi positif bagi manusia jika doktrin yang ditetapkan Tuhan ini ditaati manusia. Konsekuensi positif yang bisa diasumsikan sebagai kelancaran atau kesuksesan dalam menjalankan setiap roda kehidupan, dimana manusia tidak akan berkekurangan baik dari sisi keuangan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Jian Wiharja, (2001) menjelaskan bahwa perpuluhan adalah kaidah dan norma bagi persembahan kita kepada Tuhan, sebagai jumlah yang minimal, yang boleh dan wajib kita persembahkan kepada Tuhan. Kajian ini merupakan pengembangan hasil kajian terdahulu oleh Patty & Irianto, (2013) yang cakupan kajiannya lebih kecil yakni di tingkat Jemaat dengan tujuan untuk mencari makna akuntabilitas *perpuluhan* pada Jemaat GPM BETHEL Allang.

Kajian Teori

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap manusia untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Wiryoputro, (2002) mengungkapkan bahwa aktifitas apapun yang dilakukan oleh manusia di bumi merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang saat ini tengah aktual dipromosikan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun *civil society* yang tujuannya agar keputusan dan tindakan ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat (Gray *et al.*, 2006; Geln Lehman, (2007).

Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan yang didasarkan atas kewajiban untuk menunjukkan, mengungkapkan dan mengambil tanggungjawab atas kinerja yang dicapai. *The Oxford Advance Learne’s Dictionary* mendefenisikan akuntabilitas (*accountability*) sebagai *requare or expected to*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

give an explanation for one's actions (Saleh, 1995). Akuntabilitas sebagai keperluan atau kebutuhan untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan atas segenap tindakan atau kewajiban dan alasan yang menjadi dasar pembedanya.

Laporan Keuangan (Akuntansi) Sebagai Media Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Akuntansi merupakan media akuntabilitas yang menghasilkan informasi dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai tindakan pertanggungjawaban. Tindakan pertanggungjawaban dapat dilakukan terhadap keberhasilan maupun kegagalan kepada pemberi amanah, sampai pemberi amanah atau yang mendelegasikan kewenangan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (Ulum, 2010). Pelaksanaan kegiatan (perilaku individu dan organisasi) dikatakan akuntabel, jika pelaksana berjanji untuk melakukan apa yang diamanahkan. Sebagai contoh dalam penyaluran dana bantuan, ada komitmen dari donatur untuk memberikan dana yang harusnya juga disertai oleh adanya komitmen dari penerima dana untuk melaksanakan apa yang dijanjikan kepada pemberi dana.

Akuntansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang saling terkait. Akuntabilitas merupakan konsep amanah atau pertanggung-jawaban kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan atas amanah yang diembannya. Sedangkan akuntansi adalah aktifitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang kesatuan ekonomi dan dalam pengambilan pilihan yang beralasan, diantara cara bertindak alternatif (Belkaoui, 2006). Dengan menggunakan sudut pandang keuangan, akuntansi dapat dipahami sebagai media peratnggung-jawaban suatu aktivitas, yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengetahui manfaat keuangan dari apa yang telah diinvestasikan. Oleh karena itu, informasi akuntansi akan memberikan hasil yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang pada gilirannya juga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan akuntabilitas individu dan moralitas.

Akuntabilitas Gereja

Dalam konsep Kristen, akuntabilitas adalah kewajiban setiap manusia kepada Tuhan. Wiryoputro, (2002) menjelaskan bahwa aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia di bumi ini merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Akuntabilitas dalam lingkup gereja juga terdapat pada pelayanan dengan melakukan pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian, walaupun pada kenyataannya sebagian gereja belum juga memperhatikan pengelolaan keuangan, dan terkesan lebih tertutup bagi publik. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari para pemimpin gereja sebelumnya yang telah membudaya dan turun temurun telah menjadi budaya atau tradisi.

Untuk memahami pelaksanaan akuntabilitas gereja selanjutnya Mark Schacter, (2000) melihat akuntabilitas lebih sebagai sebuah siklus, yang terdiri atas tiga aktivitas fungsional utama antara lain; *informasi, action dan response* yang merupakan interaksi antara *agent* dan *principal* dalam proses pelaksanaan akuntabilitas perpuluhan gereja. Informasi, berkaitan dengan aktivitas manajemen (*agent*) untuk menjelaskan informasi keuangan tentang rancangan kebijakan, yang berkaitan dengan sumber daya yang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan/kontrak. Kontrak didalamnya terdiri atas batasan-batasan penggunaan keuangan, akses sumber daya dan sampai dimana sumber daya tersebut sudah dicapai. *Action*. Berkaitan dengan aktifitas *principal* untuk menilai dan mengajukan tuntutan (*demands*) kepada agent berupa ketetapan-ketetapan berdasarkan Firman Allah. *Response* berkaitan dengan aktifitas *agent* untuk menggapai atau menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang diajukan *principal* atas dasar akuntabilitas perpuluhan gereja.

Perpuluhan Sebagai Tanggung Jawab Sosial

Perpuluhan juga memiliki makna lain selain dari makna milik Tuhan di dalamnya, makna lain itu adalah adanya sebuah tanggungjawab sosial di dalamnya. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa penatalayanan bisa juga dikatakan sebagai sebuah manajemen layaknya pada suatu organisasi. Penatalayanan yang *me-manage* harta benda atau kekayaan yang sudah dipercayakan dengan sepenuhnya oleh Tuhan kepadanya dan kemudian "mengembalikannya" lagi kepada Tuhan dalam bentuk perpuluhan, sehingga bisa dikatakan bahwa penatalayanan dan perpuluhan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau dijauhkan dari masing-masing sisi.

Dalam melakukan penatalayanan hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai tanggungjawab yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti yang di sampaikan (Selan Ruth F, 1995) bahwa pertanggungjawaban yang diberikan Tuhan dalam tugas penatalayanan bisa merupakan suara yang lembut namun mendorong, suara yang keras untuk mengingatkan kewajiban yang terlupakan, tetapi sebenarnya dibalik semua itu merupakan sebuah desakan yang tidak dapat terelakan oleh manusia. Secara kasat mata, perpuluhan diperuntukkan bagi Tuhan. Ada maksud tersembunyi yang sebenarnya ingin diungkapkan dari memberikan perpuluhan. Jika disimak secara seksama sebenarnya maksud yang "tersembunyi" tersebut sudah sering diutarakan sebelumnya pada bagian ini. Orientasi perpuluhan memang ditujukan kepada Tuhan, namun Tuhan juga ingin perpuluhan itu ditujukan kepada orang-orang yang sedang berkekurangan, misalnya orang-orang yang terkena bencana, janda, anak yatim, orang miskin ataupun orang sakit (Larry Burkett, 1997 dan



Ulangan 26 :12). Artinya bahwa kesejahteraan orang lain yang berkekurangan harus lah diperhatikan dan Tuhan ingin manusia sebagai perpanjangan tangan-Nya, namun agak sedikit mengherankan dengan apa yang sedang dilakukan oleh banyak orang pada saat ini berkenan dengan pemeliharaan kebutuhan jasmani orang-orang miskin yang masih sangat menyedihkan (Larry Burkett, 1997). Tuhan tentunya tidak berkenan dengan keadaan ini karena Tuhan menginginkan terciptanya sebuah keadilan atau keseimbangan diantara manusia (lihat Lukas 4 : 18-19).

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada paradigma interpretif dengan menggunakan pendekatan *Classical Phenomenologi (Transcendental Phenomenologi)* dari Edmun Husserl. Fenomenologi merupakan sebuah metode untuk mendeskripsikan pengalaman hidup dari beberapa orang tentang sebuah konsep fenomena. Penelitian fenomenologi menekankan pada pemberian makna atas suatu pengalaman beberapa orang dalam fenomena tersebut.

Pengumpulan data pada penelitian melalui pengumpulan data empiris yang dilakukan melalui a) pengamatan partisipan, b) wawancara terhadap informan dan c) pengumpulan dokumen dokumen yang terkait, seperti hasil review dan dokumentasi lainnya. Sumber non empiris yang diambil meliputi Alkitab dan literatur Kristen lainnya yang khusus membahas tentang perpuluhan. Selanjutnya adalah analisis data. Tahapan yang dilakukan adalah proses analisis data dengan menggali data normatif yang diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu tentang penatalayanan dalam Gereja GPM BETHEL. Selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian.

Langkah kedua adalah pemilihan data empiris hasil pengamatan pada situs penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diahas lebih lanjut. Dalam tahap ini akan ada data yang direduksi/dihilangkan dari hasil penelitian karena tidak berhubungan lngsung dengan fokus penelitian. Keseluruhan tahapan tersebut akan menggambarkan sebuah kerangka penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain; tahap pertama dilakukannya proses analisis data dengan menggali data normatif yang diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu tentang penatalayanan dalam Gereja GPM BETHEL. Selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian. Langkah kedua adalah pemilihan data empiris hasil pengamatan pada situs penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas lebih lanjut. Dalam tahap ini akan ada data yang di reduksi/dihilangkan dari hasil penelitian karena tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data secara sistematis sehingga mudah dipahami. Selain itu pada langkah ini juga dilakukan pengelohan data dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan terpilih terkait pengelolaan keuangan Gereja GPM

BETHEL. Keseluruhan tahapan tersebut, akan menggambarkan sebuah metode penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut, antara lain; pertama, peneliti akan melakukan kajian intensionalitas dengan menggabungkan *noema* dan *noesis* pada akuntabilitas Gereja GPM BETHEL. *Noemanya* terkait dengan objek yang dipersepsikan seperti catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen terkait administrasi keuangan gereja yang ada dalam proses pengelolaan keuangan Gereja GPM BETHEL. Sedangkan *noesisnya* merupakan pemahaman subjektif para informan melalui operasional organisasi (dalam proses pengelolaan keuangan gereja) dan persepsi masyarakat tentang akuntabilitas perpuluhan.

Tahap kedua merupakan *epoche* oleh peneliti terhadap informan dengan melakukan penggalian data di lapangan secara personal untuk mendapatkan masalah yang terkait dengan mental individu informan. Selanjutnya merupakan tahap *eidetic reduction* dengan menggunakan intuisi dan refleksitas peneliti. Pada tahapan ini akan diuraikan dan diungkapkan realitas yang diperoleh pada tahapan *epoche* untuk menemukan esensi atau realitas yang ada pada Gereja GPM BETHEL. Esensi yang akan diungkapkan adalah fenomena pemahaman tentang akuntabilitas perpuluhan.

Hasil dan Pembahasan

GPM BETHEL ALLANG dalam Dimensi sosial yang menempatkan akuntabilitas perpuluhan dalam makna sebagai tanggungjawab diri terhadap gereja dan tanggungjawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hal ini senada dengan pendapat Wiryoputro, (2002) yang merumuskan bahwa tanggungjawab yang diembankan kepada manusia bukan hanya sebatas tanggungjawab kepada Sang Pencipta tetapi juga ada pertanggungjawaban kepada sesama manusia yang disebut sebagai tanggungjawab sosial. Proses sosial yang dimaksud idealnya bisa memberi ruang bagi seseorang untuk, melakukan fungsinya, dalam artian mereka diberi kesempatan untuk memilih dan melaksanakan saluran kepentingan yang sesuai dengan preferensinya masing-masing.

Terkait dengan hal tersebut maka fungsi dan peran Gereja dalam kaitan dengan akuntabilitas sosial adalah Gereja dipanggil untuk melakukan tugas dan fungsinya seperti yang dimaksudkan dan diamanatkan oleh Allah. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, melakukan pemuridan, melakukan persekutuan dan melayani sehingga aplikasi nyata yang harus ditanamkan oleh Gereja terhadap anggotanya adalah supaya anggotanya dengan kesadaran mutlak memberikan perpuluhan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial baik dari dalam diri seseorang bagi Gereja maupun



sebaliknya. Gereja harus selalu berpikir apakah Gereja sudah melakukan tugas dan fungsinya seperti yang dikendaki oleh Yesus Kristus sebagai kepala Gereja. Semua usaha kita akan sia-sia jika tidak ada kehadiran dan kekuatan Tuhan yang memberi kekuatan (Mazmur. 127:1). Kekuatan tersebut bukanlah sebuah kekuatan yang hanya sebatas gagasan saja, melainkan lebih dari sekedar gagasan.

Fungsi dan peran Gereja dalam kaitan dengan perpuluhan sebagai akuntabilitas sosial adalah lebih diarahkan kepada anggota terhadap kesadaran memberi perpuluhan sebagai tanggung jawab sosialnya. Sehingga pemaknaan nilai perpuluhan sebagai akuntabilitas sosial dapat diilhami dan diterapkan oleh Gereja sebagai institusi maupun oleh anggotanya.

Akuntabilitas Perpuluhan Sebagai Tanggungjawab Diri Terhadap Gereja.

Perpuluhan sebagai tanggungjawab diri terhadap Gereja. Konsep ini didasari pada ayat (Maleakhi 3 : 10) berbunyi;

”Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan itu ke dalam Rumah Perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, Firman Tuhan semesta alam, Apakah Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.

Hal ini mengandung makna bahwa selain umat Kristiani bertanggungjawab secara sosial terhadap sesamanya, namun Umat Kristiani yang sejati juga mesti melihat dan memaknai bahwa ketika mereka memberikan perpuluhan, maka secara otomatis membantu perbendaharaan Gereja secara institusi, yang mana dari perpuluhan tersebut akan dikelola dengan sebaiknya oleh gereja untuk pelayanannya ditengah tengah dunia.

Akuntabilitas perpuluhan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Terhadap Orang Orang yang Membutuhkan.

Perpuluhan sebagai tanggungjawab sosial terhadap orang orang yang membutuhkan. Perpuluhan sebagai tanggungjawab sosial terhadap orang yang membutuhkan. Berangkat dari landasan Alkitab Mat 7:12;

“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Hukum Taurat dan kitab para Nabi”.

Hal ini berarti bahwa mengapa tanggung jawab umat Kristiani kepada orang lain dan lingkungan sosial dalam wujud pemberian perpuluhan harus dilakukan. Dengan demikian penanaman pemahaman tersebut, sebagai umat kristiani dalam memberi perpuluhan sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang yang membutuhkan sangat jelas untuk dilakukan dalam kehidupan keberimanannya terhadap Tuhan (alasan mendasar perpuluhan sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang yang membutuhkan). Secara Kristiani, sebagai mana diketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya.

Dengan kata lain, ia mempunyai kewajiban-kewajiban moral terhadap lingkungan sosialnya. Kewajiban sangat erat kaitannya dengan eksistensi seseorang sebagai bagian dari lingkungan sekitar dan tanggung jawab sosial itu sebagai umat Kristiani dapat diaplikasikan dalam wujud pemberian perpuluhan sebagai tanggung jawab sosial itu sendiri. Dengan demikian umat Kristiani harus menyadari bahwa ketika mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap orang lain, tidak sepatutnya bagi mereka menuntut orang lain melakukan hal yang sama terhadap mereka, bahkan meminta kepada untuk Tuhan memberikan berkat.

Simpulan

Pemaknaan atas beberapa temuan dilapangan memberikan hasil pemaknaan praktik akuntabilitas perpuluhan yang dimaknai dalam dimensi akuntabilitas sosial. Pertama, sebagai tanggung jawab diri terhadap gereja. Sesuai dengan kitab Maleakhi 3 ayat 10, ayat Alkitab ini mengisyaratkan kepada jemaat untuk membawa perpuluhan kita ke rumah perbendaharaan yang dapat diartikan gereja untuk dikelola sebagaimana mestinya. Hidup pelayanan yang sejati adalah bagaimana kita melayani orang lain, dan salah satu wujud nyata adalah kehidupan keKristenan sebagai gereja yang hidup adalah memberikan perpuluhan (melalui gereja) yang kemudian akan didistribusikan secara baik dan benar oleh gereja kepada orang-orang yang berhak mendapatkan atau menerimanya.

Kedua, sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Perpuluhan juga memiliki makna lain selain dari makna milik Tuhan didalamnya, amkan lain itu adalah adanya sebuah tanggung jawab sosial didalamnya. Dengan mendasari pada Alkitab, Imamat 23 ayat 22, maka dua hal yang dipahami yaitu; pertama, bahwa berbicara tentang kehidupan Kristen yaitu tanggung jawab terhadap sesama dan tanggung jawab terhadap alam. Artinya sbegai orang Kristen memiliki tugas terhadap kelompok orang-orang khusus (orang miskin). Kedua, bahwa berbicara tentang tanggung jawab terhadap orang asing, yaitu selaku orang percaya, bagaimana memberi dengan sukarela. Berdasarkan hasil pemaknaan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Jemaat GPM BETHEL Allang menyadari dan menagakuai bahwa segalanya berasal dari Tuhan dan semua yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan. Kita adalah debu dan abu yang akan selamanya menjadi pengelolanya.

Daftar Pustaka

Anthony J. Berry. (2005). Accountability and Control in a Cat's Cradle. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(2).



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09513570510588751>
- Belkaoui, A. R. (2006). *Teori Akuntansi* (Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Booth, P. (1993). Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6(4), 37–67.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09513579310045684>
- Duncan, J. B., Flesher, D. L., & Stocks, M. H. (1999). Internal Control Systems in US Churches: An Examination of the Effects of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12(2), 142–164.
<https://doi.org/10.1108/09513579910270084>
- Geln Lehman. (2007). The Accountability of NGO' in Civil Society and it's Public Spheres. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(6), 645–669.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.04.002>
- Jacobs, K and Walker, S. (2000). Accounting and Accountability in The Lona Community. *Interdisciplinary Perspective on Accounting Conference*. Manchester.
- Jian Wiharja. (2001). *Persembahan yang Baik & Benar*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=568689>
- Larry Burkett. (1997). *Kunci Sukses Bisnis Menurut Alkitab; Panduan Lengkap Tentang Prinsip-Prinsip Alkitab Bagi Usahawan*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=376704>
- Laughlin, R. C. (1988). Accounting in its Social Context: An Analysis of the Accounting Systems of the Church of England. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(2), 19–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000004622>
- Laughlin, R. C. (1990). a Model of Financial Accountability and the Church of England. *Financial Accountability and Management*, 6(2), 93–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1990.tb00427.x>
- Lightbody, M. (2001). Accounting & Accountants in Church Organizations: A Critical Reflection. *The Third Asia Pasific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*. Adelaide.
- Lobo, Annie, P. (2007). *Konsep Akuntabilitas Dalam Perspektif Kristen*, Tesis (tidak dipublikasikan), FEB - Universitas Brawijaya.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 1998. Alkitab.Jakarta :Lembaga Alkitab Indonesia.
- Mark Schacter. (2000). *Public Sector Reform in Developing Countries Issues, Lessons and Future Directions*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Public_Sector_Reform_in_Developing_Count/QXZaOAAACAAJ?hl=id
- McGann, J., & Johnstone, M. (2005). The Power Shift and the NGO Credibility Crisis. *The Brown Journal of World Affairs*, 11(2), 159–172. Retrieved from <https://bjwa.brown.edu/11-2/the->

power-shift-and-the-ngo-credibility-crisis/

- Novie, A. (2024). *Konsep Kepemilikan Dalam Perspektif Kristen Berbasis Perpuluhan*. Tesis (tidak dipublikasikan), FEB - Universitas Brawijaya.
- Patty, A. C., & Irianto, G. (2013). Akuntabilitas Perpuluhan Gereja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 177–187. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7191>
- Saerang, D. P. E. (2003). Accountability and Accounting in a Religious Organisation: an Interpretive Ethnographic Study of the Pentecostal Church of Indonesia. *University of Wollongong Research Online*, Abstract. Retrieved from <http://ro.uow.edu.au/theses/1902>
- Saleh, S. H. & A. I. (1995). Accountability. In *Accountability The Endless Prophecy*. Asian and Pacific Development Centre.
- Selan Ruth F. (1995). *Menggali Keuangan Gereja*. Retrieved from <http://opacdpakaltengprov.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1890>
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiryoputro. (2002). *Management Religius Aspect Christianity* (5th ed.). Jakarta: Gunung Mulia.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.